

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Identifikasi Perkembangan Harga

Bagian ini menyajikan analisis perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni 2026). Analisis menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Ciamis sebagai indikator mingguan serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tasikmalaya sebagai proksi inflasi bulanan. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

1. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mingguan - Data Asli Kabupaten Ciamis

Berbeda dengan IHK yang diterbitkan secara bulanan menggunakan proksi Kota Tasikmalaya, IPH merupakan indikator mingguan yang disusun berdasarkan data harga di Kabupaten Ciamis. Data tersebut dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. IPH menggambarkan perubahan harga komoditas pangan strategis dari minggu ke minggu sehingga mampu memberikan informasi yang lebih cepat mengenai dinamika harga di tingkat daerah.

Grafik. 1 Tren IPH Mingguan Kabupaten Ciamis vs Jawa Barat, Januari-Juni 2026

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis mengalami deflasi secara berturut-turut sepanjang April 2026, dari -0,93 persen pada minggu pertama hingga -2,39 persen pada minggu kelima. Memasuki Mei 2026, tekanan deflasi mulai mereda hingga mencapai -0,09 persen pada minggu ketiga. Selanjutnya, pada Juni 2026 terjadi pembalikan arah menjadi inflasi dengan puncak 1,76 persen pada minggu pertama sebelum melandai menjadi 0,98 persen pada minggu keempat. Perubahan dari deflasi menuju inflasi dalam waktu relatif singkat menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan TPID terhadap dinamika pasokan dan harga pangan.

Selama April hingga awal Mei 2026, penurunan harga terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras sebagai komoditas utama penyumbang deflasi. Kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya pasokan akibat panen raya dan membaiknya produksi peternakan. Sebaliknya, pada Juni 2026 inflasi didorong oleh kenaikan harga daging sapi, bawang merah, dan jeruk, yang menunjukkan adanya pergeseran sumber tekanan harga pada komoditas pangan segar.

Tabel. 1 Rincian Mingguan April

Minggu	IPH (% wow)	Komoditas Andil Utama
Minggu 1	-0.93%	Cabai Merah (-0,54), Cabai Rawit (-0,38), Bawang Merah (-0,19)
Minggu 2	-1.23%	Cabai Merah (-0,50), Cabai Rawit (-0,32), Daging Ayam Ras (-0,27)
Minggu 3	-1.59%	Cabai Rawit (-0,47), Cabai Merah (-0,43), Daging Ayam Ras (-0,36)
Minggu 4	-2.15%	Cabai Rawit (-0,58), Daging Ayam Ras (-0,56), Cabai Merah (-0,42)

Minggu	IPH (% wow)	Komoditas Andil Utama
Minggu 5	-2.39%	Cabai Rawit (-0,68), Daging Ayam Ras (-0,63), Cabai Merah (-0,39)

Berdasarkan Tabel 1, deflasi selama April 2026 terutama dipengaruhi oleh penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Ketiga komoditas tersebut secara konsisten memberikan andil negatif terhadap IPH pada setiap minggu. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya pasokan sebagai dampak panen raya dan stabilnya produksi peternakan.

Tabel. 2 Rincian Mingguan Mei 2026

Minggu	IPH (% wow)	Komoditas Andil Utama
Minggu 1	-1.16%	Cabai Rawit (-0,49), Daging Ayam Ras (-0,47), Daging Sapi (-0,26)
Minggu 2	-0.97%	Daging Ayam Ras (-0,44), Cabai Rawit (-0,41), Daging Sapi (-0,26)
Minggu 3	-0.09%	Daging Ayam Ras (-0,27), Telur Ayam Ras (-0,22), Cabai Rawit (-0,21)
Minggu 4	Tidak Tersedia	Data tidak tersedia pada minggu berjalan

Tabel 2 menunjukkan bahwa tekanan deflasi mulai berkurang dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga masih didominasi oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi, namun besarnya andil negatif semakin kecil. Hal tersebut mengindikasikan mulai tercapainya keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Tabel. 3 Rincian Mingguan Juni 2026

Minggu	IPH (% wow)	Komoditas Andil Utama
Minggu 1	+1.76%	Daging Sapi (0,41), Cabai Merah (0,35), Bawang Merah (0,33)
Minggu 2	+1.35%	Bawang Merah (0,51), Daging Sapi (0,41), Jeruk (0,15)
Minggu 3	+1.26%	Bawang Merah (0,54), Daging Sapi (0,41), Jeruk (0,15)
Minggu 4	+0.98%	Bawang Merah (0,44), Daging Sapi (0,41), Jeruk (0,15)

Berdasarkan Tabel 3, pada Juni 2026 terjadi perubahan dari deflasi menjadi inflasi. Kenaikan harga terutama disumbang oleh daging sapi, bawang merah, dan jeruk. Pergeseran komoditas penyumbang inflasi menunjukkan bahwa tekanan harga tidak lagi berasal dari kelompok komoditas yang sama seperti pada April dan Mei.

2. Rata-rata IPH Bulanan: Triwulan I vs Triwulan II 2026

Tabel. 4 Data IPH Jawa Barat pada sebagian minggu Maret dan seluruh minggu Mei 2026

Bulan	Rata-rata IPH Ciamis (%)	Rata-rata IPH Jabar (%)	Triwulan
Januari 2026	-2,92%	-1,59%	TW I
Februari 2026	1,48%	1,93%	TW I
Maret 2026	1,60%	0,72%*	TW I
April 2026	-1,66%	-1,91%	TW II
Mei 2026	-0,74%	N/A*	TW II
Juni 2026	1,34%	0,59%	TW II

Grafik. 2 Rata-rata IPH Bulanan Kab. Ciamis vs Jawa Barat, Triwulan I vs Triwulan II 2026

Berdasarkan Tabel 4 dan Grafik 2, perkembangan harga pada Triwulan I 2026 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan Triwulan II. Pada Januari terjadi deflasi sebesar -2,92 persen, kemudian berbalik menjadi inflasi 1,60 persen pada Maret. Sementara itu, Triwulan II menunjukkan pola yang sama, tetapi dengan fluktuasi yang lebih rendah, yaitu dari -1,66 persen pada April menjadi 1,34 persen pada Juni.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Kabupaten Ciamis pada Triwulan II relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun perubahan arah harga masih terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

3. Ringkasan Perkembangan Inflasi Bulanan (IHK)

Sebagai pelengkap data IPH mingguan di atas, tabel berikut merangkum perkembangan IHK bulanan (*proksi Kota Tasikmalaya*) beserta andil masing-masing kelompok pengeluaran selama Triwulan II 2026.

Tabel. 5 Perkembangan IHK bulanan (proksi Kota Tasikmalaya)

Indikator	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Rata-rata TW II
IHK (mtm)	-0,18%	0,04%	0,03%	-0,04%
IHK (yoy)	2,77%	2,82%	2,72%	2,77%
<i>Volatile Food (mtm)</i>	-2,46%	-0,48%	-0,87%	-1,27%
<i>Administered Prices (mtm)</i>	0,16%	0,11%	0,73%	0,33%
<i>Inti / Core (mtm)</i>	0,23%	0,12%	0,05%	0,13%

Grafik. 3 Perbandingan Inflasi Bulanan (mtm) Kab. Ciamis, Jawa Barat, dan Nasional

Grafik 3 menunjukkan bahwa pada April 2026 Kabupaten Ciamis mengalami deflasi sebesar -0,18 persen (*mtm*), lebih dalam dibandingkan Jawa Barat (-0,07 persen) dan berlawanan dengan nasional yang mencatat inflasi (0,13 persen). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh normalisasi harga pangan setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

Pada Mei dan Juni 2026 inflasi kembali positif, namun relatif rendah, masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,03 persen. Dibandingkan Jawa Barat maupun nasional, laju inflasi Kabupaten Ciamis tetap lebih terkendali sehingga menunjukkan efektivitas pengendalian harga selama Triwulan II 2026

4. Perbandingan Inflasi Tahunan (yoy) Antarwilayah

Untuk memberikan gambaran mengenai posisi inflasi Kabupaten Ciamis dibandingkan wilayah pembanding, dilakukan analisis inflasi tahunan (*year-on-year/yoy*) menggunakan data IHK Kota Tasikmalaya sebagai proksi Kabupaten Ciamis. Perbandingan dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat dan nasional selama Triwulan II Tahun 2026.

Tabel. 6 Perbandingan Inflasi Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan Nasional Triwulan II Tahun 2026

Wilayah	April (<i>mtm</i>)	Mei (<i>mtm</i>)	Juni (<i>mtm</i>)	Juni (<i>yoy</i>)
Kab. Ciamis (<i>proksi Kota Tasikmalaya</i>)	-0,18%	0,04%	0,03%	2,72%
Jawa Barat	-0,07%	0,24%	0,28%	3,08%
Nasional	0,13%	0,28%	0,44%	3,34%

Grafik. 4 Tren Inflasi Tahunan (yoy) Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 6 dan Grafik 4, inflasi tahunan Kabupaten Ciamis selama Triwulan II 2026 berada pada kisaran 2,72-2,82 persen. Tingkat inflasi tersebut relatif stabil dan secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang berada pada kisaran 3,07-3,08 persen, maupun nasional sebesar 3,08-3,34 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kabupaten Ciamis masih berada dalam kondisi yang terkendali. Stabilitas harga ini mengindikasikan bahwa perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Ciamis relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Meskipun demikian, meningkatnya inflasi tahunan di tingkat Jawa Barat dan nasional pada Juni 2026 perlu menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di Kabupaten Ciamis pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, pemantauan terhadap komoditas strategis dan koordinasi pengendalian inflasi perlu terus diperkuat.

5. Analisis Kelompok Pengeluaran (IHK)

Untuk mengetahui sumber utama pembentuk inflasi, analisis dilakukan berdasarkan tiga kelompok pengeluaran utama dalam IHK, yaitu *Volatile Food*, *Administered Prices*, dan *Core Inflation*.

Grafik. 5 Andil Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Bulanan

Grafik 5 menunjukkan bahwa dinamika inflasi Kabupaten Ciamis selama Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh pergerakan ketiga kelompok pengeluaran dengan karakteristik yang berbeda. Kelompok *Volatile Food* menjadi faktor utama yang menahan inflasi, sedangkan kelompok *Administered Prices* memberikan tekanan inflasi yang semakin meningkat pada akhir triwulan. Di sisi lain, kelompok inti (*Core Inflation*) menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan tren melandai.

a. Kelompok Harga Bergejolak (*Volatile Food*)

Kelompok *Volatile Food* mengalami deflasi sepanjang Triwulan II 2026, yaitu sebesar -2,46 persen pada April, -0,48 persen pada Mei, dan -0,87 persen pada Juni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan komoditas pangan, khususnya hasil hortikultura dan peternakan, relatif mencukupi sehingga mampu menekan laju inflasi. Deflasi pada kelompok ini menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas harga selama Triwulan II 2026.

b. Kelompok Harga Diatur Pemerintah (*Administered Prices*)

Berbeda dengan kelompok *Volatile Food*, kelompok *Administered Prices* menunjukkan kecenderungan meningkat. Inflasi pada kelompok ini naik dari 0,16 persen pada April menjadi 0,73 persen pada Juni. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tarif kereta api, serta tarif transportasi daring yang meningkat seiring bertambahnya mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah.

c. Kelompok Inti (*Core Inflation*)

Kelompok inti (*Core Inflation*) menunjukkan tren yang semakin melandai, yaitu dari 0,23 persen pada April menjadi 0,05 persen pada Juni. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama berasal dari kenaikan harga minyak goreng dan beberapa komoditas elektronik yang dipengaruhi oleh perkembangan harga global dan gangguan rantai pasok.

6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi (IHK)

Analisis komoditas penyumbang inflasi dan deflasi dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan inflasi setiap bulan selama Triwulan II Tahun 2026.

Tabel. 7 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi April 2026

No	Komoditas	Andil (% mtm)
1	Minyak Goreng	0,109

No	Komoditas	Andil (% mtm)
2	Sewa Rumah	0,033
3	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,046
4	Telepon Seluler	0,029
5	Soto	0,024
6	Daging Ayam Ras	-0,175
7	Emas Perhiasan	-0,136
8	Telur Ayam Ras	-0,116
9	Cabai Rawit	-0,049
10	Angkutan Antar Kota	-0,021

Pada April 2026, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, telepon seluler, dan soto. Sebaliknya, deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga daging ayam ras, emas perhiasan, telur ayam ras, cabai rawit, dan angkutan antarkota. Dominasi komoditas pangan menunjukkan bahwa kondisi pasokan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi pada bulan tersebut.

Tabel. 8 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Mei 2026

No	Komoditas	Andil (% mtm)
1	Minyak Goreng	0,031
2	Buah Naga	0,022
3	Sate	0,022
4	Telepon Seluler	0,021
5	Cabai Merah	0,020
6	Emas Perhiasan	-0,170
7	Telur Ayam Ras	-0,083
8	Daging Ayam Ras	-0,073
9	Jengkol	-0,018
10	Angkutan Antar Kota	-0,007

Pada Mei 2026, tekanan inflasi masih didominasi oleh minyak goreng, diikuti buah naga, sate, telepon seluler, dan cabai merah. Di sisi lain, penurunan harga emas perhiasan, telur ayam ras, dan daging ayam ras menjadi faktor utama penahan inflasi. Dibandingkan April, tekanan harga mulai bergeser dari komoditas pangan menuju beberapa komoditas nonpangan.

Tabel. 9 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Juni 2026

No	Komoditas	Andil (% mtm)
1	Bensin	0,039
2	Daun Bawang	0,022
3	Bawang Merah	0,020
4	Wortel	0,020
5	Sigaret Kretek Klasik	0,016

No	Komoditas	Andil (% mtm)
6	Daging Ayam Ras	-0,130
7	Telur Ayam Ras	-0,042
8	Emas Perhiasan	-0,030
9	Jeruk	-0,022

Pada Juni 2026, inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga bensin, daun bawang, bawang merah, wortel, dan sigaret kretek klasik. Sementara itu, daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, jeruk, dan mentimun masih menjadi komoditas utama penyumbang deflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi mulai dipengaruhi oleh komoditas energi dan hortikultura, sementara harga beberapa komoditas pangan strategis masih relatif terkendali.

Secara umum, selama Triwulan II 2026 daging ayam ras, telur ayam ras, dan emas perhiasan secara konsisten menjadi komoditas penyumbang deflasi. Sebaliknya, minyak goreng, komoditas energi (BBM dan bahan bakar rumah tangga), serta telepon seluler menjadi penyumbang utama inflasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa dinamika inflasi Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh perubahan harga pangan dan energi.

7. Perbandingan dengan Triwulan Sebelumnya

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, perkembangan harga pada Triwulan I 2026 menunjukkan *volatilitas* yang lebih tinggi dibandingkan Triwulan II. Pada Triwulan I terjadi perubahan dari deflasi -2,92 persen pada Januari menjadi inflasi 1,60 persen pada Maret, dengan rentang fluktuasi sekitar 4,5 poin persentase. Sebaliknya, Triwulan II memperlihatkan rentang fluktuasi yang lebih sempit, yaitu sekitar 3,3 poin persentase, sehingga mencerminkan kondisi harga pangan yang relatif lebih stabil.

Sementara itu, berdasarkan data IHK (*proksi Kota Tasikmalaya*), rata-rata inflasi bulanan Triwulan II tercatat -0,04 persen (*mtm*), yang menunjukkan kecenderungan lebih rendah dibandingkan akhir Triwulan I. Namun, karena data IHK Januari-Maret 2026 belum tersedia secara lengkap, perbandingan antartriwulan masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, pelengkapan data IHK Triwulan I perlu dilakukan agar evaluasi perkembangan inflasi pada laporan selanjutnya dapat disajikan secara lebih komprehensif.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

B. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil analisis perkembangan harga dan inflasi pada Poin A, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2026. Permasalahan tersebut bersumber dari faktor

eksternal, dinamika harga pangan segar, faktor internal daerah, serta tantangan struktural yang memengaruhi sistem pemantauan dan pengendalian inflasi.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi yang berasal dari luar kendali pemerintah daerah, namun memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga di Kabupaten Ciamis. Selama Triwulan II Tahun 2026, tekanan eksternal terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak sawit dunia yang mendorong kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Selain itu, gangguan rantai pasok global pada komponen elektronik turut meningkatkan harga telepon seluler dan laptop/notebook.

Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika harga energi global dan pergerakan nilai tukar rupiah yang berdampak pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Di sisi lain, perubahan tarif transportasi, seperti kereta api dan transportasi daring, merupakan kebijakan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, namun tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered prices*).

2. Volatilitas Harga Pangan Segar

Hasil analisis IPH mingguan menunjukkan bahwa harga pangan segar di Kabupaten Ciamis masih berfluktuasi cukup tinggi. Selama Triwulan II Tahun 2026 terjadi perubahan yang signifikan, yaitu dari deflasi sebesar -2,39 persen pada akhir April menjadi inflasi sebesar 1,76 persen pada awal Juni. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga komoditas strategis, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, daging sapi, dan bawang merah, sangat dipengaruhi oleh perubahan pasokan dan permintaan dalam jangka pendek.

Selain itu, komoditas penyumbang perubahan harga juga mengalami pergeseran. Pada April hingga Mei, tekanan harga didominasi oleh komoditas hortikultura dan unggas, sedangkan pada Juni beralih kepada daging sapi dan bawang merah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sumber tekanan inflasi bersifat dinamis sehingga memerlukan pemantauan harga secara berkala, tidak hanya berdasarkan data inflasi bulanan.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya kekosongan data IPH pada beberapa periode pengamatan, khususnya minggu keempat Mei 2026 di Kabupaten Ciamis serta sebagian data Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan tersebut berpotensi mengurangi ketepatan analisis perkembangan harga dan perlu diperbaiki melalui peningkatan kontinuitas pelaporan data.

3. Faktor Internal

Selain dipengaruhi faktor eksternal, perkembangan inflasi di Kabupaten Ciamis juga dipengaruhi oleh kondisi internal daerah. Salah satu faktor utama adalah terbatasnya pasokan material konstruksi akibat penertiban aktivitas pertambangan, yang menyebabkan kenaikan harga pasir dan berdampak pada biaya pembangunan.

Tekanan biaya juga tercermin dari meningkatnya upah tenaga kerja konstruksi, khususnya tukang bukan mandor, yang berkontribusi terhadap kenaikan biaya produksi. Di sektor pangan, fluktuasi produksi peternakan unggas menyebabkan perubahan harga daging ayam

ras dan telur ayam ras, meskipun secara umum kondisinya menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, produksi komoditas hortikultura masih sangat bergantung pada musim tanam dan kondisi cuaca. Ketergantungan tersebut menyebabkan harga cabai, bawang, jeruk, dan komoditas hortikultura lainnya cenderung berfluktuasi mengikuti siklus produksi.

4. Tantangan Struktural Khusus Kabupaten Ciamis

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis juga menghadapi beberapa tantangan struktural. Kabupaten Ciamis belum menjadi daerah penghitungan IHK oleh BPS sehingga pemantauan inflasi masih menggunakan data proksi Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menyebabkan karakteristik konsumsi masyarakat dan dinamika harga lokal belum sepenuhnya tergambarkan dalam indikator inflasi yang digunakan.

Di samping itu, cakupan pemantauan harga di tingkat kecamatan masih terbatas sehingga potensi disparitas harga antarwilayah belum dapat teridentifikasi secara optimal. Keterbatasan tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Tantangan lainnya adalah masih adanya ketergantungan terhadap pasokan komoditas strategis dari luar daerah melalui mekanisme kerja sama antardaerah, terutama untuk komoditas seperti jagung dan telur ayam ras. Apabila terjadi gangguan produksi atau distribusi pada daerah pemasok, maka pasokan di Kabupaten Ciamis berpotensi terganggu dan memicu peningkatan harga di pasar.

Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perkembangan harga komoditas global dan kebijakan nasional, tetapi juga oleh faktor internal berupa fluktuasi produksi pangan, keterbatasan pasokan, serta tantangan struktural dalam sistem pemantauan harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas pemantauan harga secara mingguan, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

C. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2026 mengacu pada strategi nasional pengendalian inflasi melalui Strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Berbagai program yang dilaksanakan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

1. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu instrumen utama TPID dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Tabel. 10 Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Kabupaten Ciamis Triwulan II Tahun 2026

Tanggal	Lokasi	Komoditas FDP yang Disediakan	Keterangan
22 Mei 2026	Lapang Desa Gegempalan, Kec. Cikoneng	Beras medium, minyak goreng, terigu, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting	GPM rutin
4 Juni 2026	Pelataran Islamic Center Ciamis	Beras medium, minyak goreng, terigu, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting	GPM rutin, lokasi pusat kota
26 Juni 2026	Lapang Desa Buniseuri, Kec. Cipaku	Beras medium, minyak goreng, terigu, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting	GPM rutin, wilayah kecamatan

Berdasarkan Tabel 10, selama Triwulan II Tahun 2026 TPID Kabupaten Ciamis melaksanakan tiga kali Gerakan Pangan Murah, yaitu di Kecamatan Cikoneng, kawasan pusat kota (Islamic Center Ciamis), dan Kecamatan Cipaku. Sebaran lokasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GPM tidak hanya difokuskan di pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau wilayah kecamatan sehingga akses masyarakat terhadap pangan murah menjadi lebih merata.

Komoditas yang disediakan pada setiap pelaksanaan GPM meliputi beras medium, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus komoditas yang memiliki tingkat volatilitas harga relatif tinggi sebagaimana hasil analisis pada Bab A.

Pelaksanaan GPM juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil identifikasi permasalahan pada Poin B. Penyediaan komoditas hortikultura dan pangan strategis secara langsung kepada masyarakat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tekanan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama periode pengamatan.

2. Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) merupakan strategi untuk memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi komoditas strategis. Melalui kerja sama ini,

pemerintah daerah berupaya menjamin keberlanjutan pasokan dari daerah yang memiliki surplus produksi.

Pada 20 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan pembahasan tindak lanjut Kerja Sama Antar Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Garut terkait penyusunan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) bisnis ke bisnis (*Business to Business*) untuk komoditas jagung dan telur ayam ras.

Pemilihan kedua komoditas tersebut didasarkan pada kebutuhan menjaga keberlanjutan rantai pasok sektor peternakan. Jagung merupakan bahan baku utama pakan ternak, sedangkan telur ayam ras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga selama Triwulan II Tahun 2026. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan sehingga stabilitas harga komoditas peternakan tetap terjaga.

3. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Kerangka 4K

Untuk menilai keterpaduan kebijakan yang telah dilaksanakan, seluruh program pengendalian inflasi dipetakan berdasarkan kerangka 4K sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel. 11 Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Berdasarkan Kerangka 4K

Strategi 4K	Implementasi Kebijakan
Keterjangkauan Harga	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Cipaku, dan kawasan Islamic Center Ciamis.
Ketersediaan Pasokan	Tindak lanjut Kerja Sama Antar Daerah dengan Kabupaten Garut untuk komoditas jagung dan telur ayam ras.
Kelancaran Distribusi	Distribusi komoditas pangan strategis ke lokasi GPM di pusat kota maupun wilayah kecamatan.
Komunikasi Efektif	Publikasi perkembangan inflasi dan koordinasi rutin TPID dengan instansi terkait.

Berdasarkan Tabel 11, seluruh kegiatan pengendalian inflasi yang dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2026 telah mencakup keempat pilar dalam Strategi 4K. Aspek keterjangkauan harga diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sedangkan aspek ketersediaan pasokan diperkuat melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID memastikan komoditas pangan strategis dapat didistribusikan hingga wilayah kecamatan sehingga memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, aspek komunikasi efektif diwujudkan melalui penyampaian informasi perkembangan inflasi secara berkala serta koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.

Meskipun demikian, hasil analisis pada Poin A dan B menunjukkan bahwa beberapa komoditas, khususnya komoditas hortikultura dan produk peternakan, masih mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam kerangka

4K perlu terus diperkuat melalui peningkatan pemantauan harga secara berkala, perluasan kerja sama antardaerah, serta optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada periode-periode yang berpotensi mengalami kenaikan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

D. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2026. Penilaian didasarkan pada perkembangan inflasi, stabilitas harga pangan, serta implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

1. Keberhasilan Kebijakan

Tabel. 12 Capaian Utama Pengendalian Inflasi Triwulan II Tahun 2026

Indikator	Capaian
Inflasi bulanan (mtm)	Rata-rata -0,04%
Inflasi tahunan (yoy)	2,72-2,82%
Pelaksanaan GPM	3 lokasi
Kerja Sama Antar Daerah	Pembahasan MoU Garut

Berdasarkan Tabel 12, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan beberapa capaian positif. Inflasi Kabupaten Ciamis yang menggunakan IHK Kota Tasikmalaya sebagai proksi berhasil dipertahankan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Rata-rata inflasi bulanan bahkan tercatat mengalami deflasi tipis sebesar -0,04 persen, sedangkan inflasi tahunan berada pada kisaran 2,72-2,82 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Dari sisi intervensi pasar, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tiga lokasi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan. Pelaksanaan kegiatan di wilayah pusat kota maupun kecamatan juga menunjukkan upaya pemerataan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Selain itu, pembahasan kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Garut merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketersediaan pasokan komoditas jagung dan telur ayam ras. Kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan gejolak harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan ketahanan pasokan dalam jangka menengah.

2. Kelemahan dan Area Perbaikan

Meskipun menunjukkan capaian yang positif, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi masih menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian.

- Tekanan inflasi dari kelompok Administered Prices meningkat cukup tajam pada Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang intervensi yang terbatas terhadap kebijakan penyesuaian harga energi dan tarif transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun badan usaha.
- Kabupaten Ciamis belum memiliki data IHK sendiri sehingga analisis inflasi masih bergantung pada data proksi Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menyebabkan karakteristik konsumsi masyarakat dan dinamika harga lokal belum dapat tergambarkan secara optimal.
- Efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia data mengenai dampak kegiatan terhadap penurunan harga di tingkat konsumen maupun tingkat kepuasan masyarakat.
- Frekuensi pelaksanaan GPM masih relatif terbatas dibandingkan luas wilayah Kabupaten Ciamis sehingga belum seluruh kecamatan memperoleh manfaat secara langsung.

Selain itu, kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Garut masih berada pada tahap penyusunan tindak lanjut nota kesepahaman sehingga manfaatnya terhadap stabilitas pasokan dan harga belum dapat diukur secara empiris.

3. Analisis Efektivitas Kebijakan

Secara umum, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan penguatan kerja sama antardaerah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas harga pangan selama Triwulan II Tahun 2026. Hal tersebut tercermin dari kelompok *Volatile Food* yang secara konsisten mengalami deflasi serta menurunnya harga komoditas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras.

Namun demikian, efektivitas kebijakan daerah masih terbatas dalam mengendalikan inflasi yang berasal dari kelompok Administered Prices dan kelompok inti (*Core Inflation*). Hal ini disebabkan sebagian besar faktor penyebabnya berasal dari luar kewenangan pemerintah daerah, seperti perkembangan harga energi global, nilai tukar rupiah, penyesuaian harga BBM, tarif transportasi, dan gangguan rantai pasok global.

Dengan demikian, strategi pengendalian inflasi ke depan tidak hanya perlu mengandalkan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah, tetapi juga memperkuat langkah antisipatif melalui pemantauan harga, penguatan pasokan, serta komunikasi publik yang lebih efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

E. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pada Triwulan II Tahun 2026, disusun

sejumlah rekomendasi sebagai bahan penguatan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan Strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

1. Rekomendasi Jangka Pendek (1-3 bulan ke depan)

Tabel. 13 Rekomendasi Jangka Pendek

No	Rekomendasi	Strategi 4K
1	Meningkatkan frekuensi dan cakupan GPM	Keterjangkauan Harga
2	Mempercepat implementasi KAD Garut	Ketersediaan Pasokan
3	Memperkuat komunikasi publik	Komunikasi Efektif
4	Monitoring komoditas hortikultura	Ketersediaan Pasokan
5	Menjamin kontinuitas data IPH	Komunikasi Efektif
6	Intervensi cepat berdasarkan IPH	Keterjangkauan Harga

Dalam jangka pendek, prioritas utama diarahkan pada peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, percepatan implementasi kerja sama antardaerah, penguatan pemantauan harga pangan strategis, serta peningkatan kualitas pelaporan IPH sebagai sistem peringatan dini. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan respons TPID terhadap perubahan harga yang terjadi dalam waktu singkat.

2. Rekomendasi Jangka Menengah (Triwulan III-IV 2026)

Tabel. 14 Rekomendasi Jangka Menengah

No	Rekomendasi	Tujuan
7	Penguatan sistem pemantauan harga	Meningkatkan akurasi data
8	Membangun sistem money GPM	Mengukur efektivitas program
9	Memperluas KAD	Memperkuat pasokan
10	Penguatan produksi lokal peternakan	Mengurangi ketergantungan pasokan

Dalam jangka menengah, kebijakan diarahkan pada penguatan sistem pengendalian inflasi yang lebih berbasis data. Selain meningkatkan kualitas pemantauan harga, diperlukan evaluasi dampak Gerakan Pangan Murah secara terukur serta perluasan kerja sama antardaerah untuk mengurangi risiko gangguan pasokan komoditas strategis. Penguatan produksi lokal juga perlu dilakukan guna meningkatkan ketahanan pangan daerah.

3. Proyeksi dan Antisipasi Triwulan III 2026

Berdasarkan perkembangan inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, tekanan inflasi pada Triwulan III diperkirakan masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi, biaya transportasi, serta dinamika harga komoditas pangan musiman. Peningkatan inflasi tahunan di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Barat juga berpotensi memberikan tekanan terhadap

perkembangan harga di Kabupaten Ciamis.

Oleh karena itu, TPID Kabupaten Ciamis perlu memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah, percepatan implementasi kerja sama antardaerah, pemantauan harga secara lebih intensif, serta penguatan komunikasi publik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, dan mengendalikan ekspektasi inflasi pada Triwulan III Tahun 2026.